

Barang publik dan tantangan pemerintah dalam pemerataan akses

Uswatun Khasanah

Program studi Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
e-mail: *uswaatunkhasanah10@gmail.com

Kata Kunci:

Barang Publik; Tantangan; Pemerintah; Pemerataan; Akses.

Keywords:

Public Goods; Challenges; Government; Equalization; Access.

ABSTRAK

Barang publik adalah barang-barang yang secara kolektif dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Barang publik diperoleh tanpa biaya (non-excludable) dan tanpa persaingan (non-rivalry). Konsep konsumsi bersama ini menggambarkan gagasan bahwa beberapa barang memiliki manfaat yang dapat dinikmati oleh banyak orang secara bersamaan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui konsep barang publik dan tantangan pemerintah dalam pemerataan akses. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian melalui studi literatur atau kepustakaan.

Pemerataan akses terhadap barang publik merupakan tanggung jawab fundamental pemerintah dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti fenomena free rider, keterbatasan anggaran, kesenjangan geografis, serta kelemahan tata kelola pemerintahan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan distribusi yang adil dan merata. Untuk itu, strategi pemerataan barang publik memerlukan kebijakan yang responsif, efisien, dan berbasis data, disertai pemanfaatan teknologi digital, penguatan pengawasan anggaran, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat peran negara dalam mewujudkan layanan publik yang adil dan merata bagi seluruh warga.

ABSTRACT

Public goods are goods that are collectively consumed by all levels of society. Public goods are obtained without cost (non-excludable) and without competition (non-rivalry). This concept of collective consumption illustrates the idea that some goods have benefits that can be enjoyed by many people simultaneously. The purpose of writing this article is to find out the concept of public goods and the government's challenges in equalizing access. The type of research in this study is library research, which is research through literature or literature studies. Equitable access to public goods is a fundamental responsibility of the government in ensuring social justice and public welfare. However, various challenges such as the free rider phenomenon, budget constraints, geographical disparities, and weaknesses in governance are serious obstacles in realizing fair and equitable distribution. For this reason, the strategy of equitable distribution of public goods requires responsive, efficient, and data-based policies, accompanied by the use of digital technology, strengthening budget supervision, and active community involvement. These steps are important to improve accountability and strengthen the role of the state in realizing fair and equitable public services for all citizens.

Pendahuluan

Konsep barang publik (public goods) merupakan salah satu pondasi terpenting dalam ekonomi politik dan administrasi publik yang menjelaskan peran fundamental negara dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan barang privat yang memiliki karakteristik rivalitas dan eksklusivitas dalam konsumsi, barang publik memiliki sifat non-rivalitas dan non-eksklusivitas yang menjadikannya sulit untuk disediakan oleh mekanisme pasar semata.



Jalan raya, taman kota, sistem pertahanan nasional, penerangan jalan umum, dan layanan keamanan publik merupakan contoh nyata barang publik yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat namun tidak dapat diproduksi secara efisien oleh sektor swasta. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan barang publik guna memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama. Penyediaan barang publik yang merata dan berkualitas menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi distributif dan alokasi sumber daya publik. Ketika akses terhadap barang publik dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, hal ini mencerminkan keberhasilan negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial dan menciptakan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara. Sebaliknya, ketimpangan akses terhadap barang publik mengindikasikan adanya kegagalan dalam tata kelola pemerintahan yang dapat berimplikasi pada meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi dan menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Secara teoritis, barang publik menghadapi permasalahan fundamental yang dikenal dengan istilah "market failure", di mana mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang tersebut dalam kuantitas dan kualitas yang optimal. Hal ini terjadi karena sifat non-eksklusivitas barang publik yang memungkinkan terjadinya fenomena free rider, yaitu situasi di mana individu dapat menikmati manfaat barang publik tanpa berkontribusi dalam pembiayaannya. Konsekuensinya, sektor swasta tidak memiliki insentif yang memadai untuk memproduksi barang publik, sehingga tanggung jawab ini secara alami beralih kepada pemerintah sebagai representasi kepentingan kolektif masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan karakteristik geografis kepulauan dan keragaman sosial-ekonomi yang tinggi, tantangan penyediaan barang publik menjadi semakin kompleks. Masalah free rider tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga pada level daerah, di mana beberapa wilayah dapat menikmati manfaat infrastruktur lintas daerah tanpa berkontribusi proporsional dalam pembiayaannya. Fenomena ini menciptakan dilema dalam alokasi sumber daya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi beban fiskal antar daerah. Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah keterbatasan data dan informasi mengenai preferensi publik terhadap berbagai jenis barang publik.

Pemerintah seringkali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi prioritas kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, mengingat tidak adanya mekanisme pasar yang dapat mengungkapkan preferensi tersebut secara langsung. Keterbatasan survey dan penelitian yang komprehensif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, seringkali menyebabkan mismatch antara penyediaan barang publik dengan kebutuhan riil masyarakat. Keterbatasan anggaran dan sumber daya pemerintah memaksa dilakukannya trade-off yang sulit dalam menentukan prioritas investasi. Kompetisi antar sektor dalam perebutan alokasi anggaran, ditambah dengan tekanan untuk mempertahankan keseimbangan fiskal, seringkali mengakibatkan under-investment dalam penyediaan barang publik. Kondisi ini diperparah oleh masalah efisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana tidak jarang terjadi pemborosan sumber daya akibat perencanaan yang kurang matang atau implementasi yang tidak optimal. Aspek tata kelola yang buruk dan praktik korupsi menjadi faktor penghambat yang sangat merugikan dalam penyediaan barang publik. Kegagalan tata kelola tidak hanya

mengurangi efektivitas alokasi sumber daya, tetapi juga menurunkan kualitas output yang dihasilkan. Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik mengakibatkan inflated cost dan penurunan kualitas infrastruktur, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai pengguna akhir. Lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas memperparah kondisi ini dan menciptakan lingkaran setan dalam pengelolaan barang publik.

Ketimpangan geografis dan sosial di Indonesia menambah kompleksitas tantangan pemerataan akses barang publik. Disparitas pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah maju dan tertinggal, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap infrastruktur dasar. Faktor geografis seperti kondisi topografi yang sulit, jarak yang jauh, dan keterbatasan konektivitas menjadikan biaya penyediaan barang publik di daerah terpencil menjadi sangat tinggi, sehingga seringkali tidak ekonomis untuk dilaksanakan. Terakhir, tantangan tata kelola dan koordinasi antar tingkat pemerintahan dan antar sektor menjadi hambatan serius dalam optimalisasi penyediaan barang publik. Sistem desentralisasi yang kompleks, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya sinkronisasi antar instansi seringkali mengakibatkan inefisiensi dan duplikasi program. Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah, juga menyulitkan implementasi program-program barang publik yang bersifat lintas wilayah.

Pembahasan

Konsep Barang Publik dalam Ekonomi

Dalam ekonomi, barang dan jasa dibagi menjadi dua kategori utama yaitu barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang dan jasa yang dapat diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana individu atau kelompok membeli barang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Contoh barang privat ini adalah pakaian, sepeda motor, dan televisi, yang dapat diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan swasta berdasarkan permintaan pasar. Namun, selain barang privat, terdapat juga jenis barang dan jasa yang tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar, yang dikenal dengan istilah barang publik. Barang publik berbeda dengan barang pribadi atau privat, barang publik adalah barang yang tidak bisa diproduksi secara efisien oleh pasar, dan oleh karena itu memerlukan campur tangan pemerintah untuk penyediaannya. Contoh dari barang publik adalah jalan raya, keamanan nasional, dan pertahanan negara. Hal ini terjadi karena pasar tidak mampu menghasilkan barang tersebut dengan cara yang efisien, mengingat karakteristik unik yang dimiliki oleh barang publik. Adanya barang publik ini menggambarkan fenomena kegagalan pasar (market failure), yang mengharuskan intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa barang tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Barang publik adalah barang-barang yang secara kolektif dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Barang publik diperoleh tanpa biaya (non-excludable) dan tanpa persaingan (non-rivalry). Konsep konsumsi bersama ini menggambarkan gagasan bahwa beberapa barang memiliki manfaat yang dapat dinikmati oleh banyak orang secara bersamaan. Tingkat pengecualian menurun dan tingkat berbagi meningkat,

membawa produk lebih dekat ke barang publik. Di sisi lain, produk akan lebih dekat dengan barang privat ketika tingkat pembagiannya lebih rendah dan tingkat pengecualiannya lebih tinggi. Selain itu, dapat dikatakan bahwa barang publik adalah barang yang, meskipun dikonsumsi oleh sebagian orang, tidak menghalangi orang lain untuk mengkonsumsinya. Barang publik tidak dapat dikecualikan atau disaingi. Ketika seseorang menggunakan aset publik, hal itu tidak mengurangi penggunaannya oleh orang lain. Hal ini dikenal sebagai non-rivalry. Setiap orang memiliki hak untuk menikmatinya, terlepas dari apakah mereka membayar atau tidak, karena barang publik tidak dapat dikecualikan (Elmizan, 2022). Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Barang publik adalah milik masyarakat secara keseluruhan, sedangkan barang kolektif adalah milik sebagian masyarakat (komunitas yang lebih kecil) dan hanya dapat digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.

Barang publik murni dan tidak murni merupakan dua kategori barang publik. Barang publik murni memiliki pasokan bersama dan tidak dapat dikecualikan berdasarkan harga (Head, 1977). Ketika produk publik murni disediakan untuk masyarakat umum, kualitasnya sama dengan unit yang disediakan untuk orang lain, dan tidak ada biaya tambahan untuk mendapatkannya. Hal ini dikenal dengan istilah suplai bersama (shared supply). Dengan kata lain, barang publik murni, juga dikenal sebagai komoditas konsumsi masyarakat murni, adalah barang yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum tanpa mengurangi konsumsi orang lain. Selain itu, barang publik murni tidak membedakan antara mereka yang membayar dan mereka yang tidak membayar (pengecualian harga tidak mungkin dilakukan). Contoh dari barang publik murni ini adalah udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya.

Secara umum, barang publik yang tidak murni memiliki dua karakteristik yaitu tidak dapat dikecualikan dengan harga dan padat. Ketika komoditas tidak murni digunakan dalam jumlah besar, maka akan menyebabkan kemacetan, sesuai dengan sifat awalnya. Sekolah umum dan jalan raya adalah contoh barang publik tidak murni yang memiliki sifat padat. Ciri kedua dari barang tidak murni adalah bahwa barang tersebut akan membedakan konsumsi antara konsumen yang membayar dan tidak membayar, serta antara konsumen yang membayar tinggi, menengah, dan rendah. Layanan yang disediakan oleh BPJS merupakan contoh barang publik tidak murni yang memiliki kualitas price-excludable (Elmizan, 2022). Barang public memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan barang lain. Sifat Barang Publik barang, yaitu:

1. Tanpa Pengecualian (Non-exclusion) : Sifat barang publik yang tidak dapat dikecualikan ini menunjukkan bahwa, asalkan barang tersebut ada, tidak ada yang dapat menghentikan orang lain untuk mengambil keuntungan darinya; dengan kata lain, setiap orang memiliki akses terhadap barang tersebut. Di pasar, barang tersebut tersedia baik bagi mereka yang membayar maupun yang tidak. Sebagai contoh, pajak dibayarkan oleh warga negara dan digunakan untuk mendanai penyediaan layanan polisi; namun, tidak hanya pembayar pajak yang berhak menggunakan layanan polisi. Layanan ini juga tersedia bagi mereka yang tidak membayar. Singkatnya, manfaat dari barang publik tidak dapat dikecualikan.

2. Tanpa Persaingan (Non Rival) : Dalam hal penggunaan barang publik, non-rival mengindikasikan bahwa penggunaan satu barang oleh satu konsumen tidak membatasi kesempatan konsumen lain untuk menikmati barang tersebut. Tanpa mengorbankan keuntungan orang lain, semua orang dapat memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam keadaan normal, misalnya, jika kita menikmati sinar matahari dan udara bersih, orang-orang di sekitar kita masih bisa mendapatkan manfaat darinya. Demikian pula, jika kita mendengar suara adzan dari masjid, misalnya, tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk mendengarnya juga (Mainingsih, 2024).

Terdapat beberapa teori barang publik, lengkapnya sebagai berikut.

1. Teori Pigou

Menurut Pigou, barang publik perlu disediakan sejauh utilitas marginalnya sama dengan ketidakpuasan marginal atas pajak yang dikumpulkan untuk mendanai program pemerintah (seperti penyediaan barang publik). Teori Pigou, yang diperkenalkan oleh Arthur Cecil Pigou, membahas bagaimana barang publik dapat disediakan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Menurut Pigou, jumlah barang publik yang disediakan harus mencapai tingkat optimal, yaitu ketika tambahan kepuasan yang diperoleh individu dari barang publik tersebut sama dengan tambahan beban yang timbul akibat pajak yang digunakan untuk membiayainya. Dengan kata lain, penyediaan barang publik harus dilakukan sedemikian rupa sehingga manfaat tambahan yang diterima masyarakat sebanding dengan biaya tambahan yang mereka tanggung dalam bentuk pajak. Dasar dari kekurangan analisis Pigou adalah ketidakbahagiaan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan kepuasan marginal terhadap barang public, namun, karena faktor-faktor ini bersifat ordinal, maka tidak dapat dievaluasi secara objektif (Rawung et al., 2024).

2. Teori Bowen

Bowen mengajukan sebuah hipotesis yang didasarkan pada teori penetapan harga dan harga barang privat. Menurut Bowen, barang publik adalah barang yang tidak mungkin diidentifikasi pengecualiannya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menolak manfaat barang publik begitu barang tersebut tersedia. Penggunaan penawaran dan permintaan oleh Bowen adalah kelemahan teori ini. Masalahnya adalah tidak ada kurva permintaan karena tidak ada prinsip pengecualian untuk barang publik, yang mencegah orang untuk mengekspresikan seberapa besar mereka menyukainya.

3. Teori Lindahl

Kuantitas produk pemerintah Teori Bowen dan Lindahl hampir sama, dengan pengecualian bahwa pembayaran setiap konsumen dinyatakan sebagai persentase dari keseluruhan biaya penyediaan barang publik dan bukan sebagai harga absolut. Kurva indifferent dengan anggaran tetap terbatas (fixed budget constrains) adalah dasar dari analisis Lindahl. Fakta bahwa teori Lindahl hanya membahas barang public bukan pasokan produk swasta yang dibuat oleh sektor swasta adalah salah

satu kelemahannya. Selain itu, penggunaan kurva indifferent merupakan kelemahan utama teori ini. Karena barang publik tidak dapat dikecualikan, tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menyatakan preferensi terhadap barang tersebut. Ada juga kritikan bahwa teori ini mengabaikan jumlah barang pribadi yang harus diciptakan agar masyarakat mencapai kesejahteraan yang optimal, dan hanya berfokus pada penyediaan barang publik.

4. Teori Anggaran

Teori ini didasarkan pada analisis yang menunjukkan bahwa setiap orang membayar jumlah yang sama untuk menggunakan barang publik, yaitu sesuai dengan sistem harga barang swasta. Karena berkonsentrasi pada distribusi awal pendapatan di antara anggota masyarakat dan dapat digunakan untuk menghitung beban pajak di antara konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah, maka teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan teori yang menganalisis penyediaan barang publik yang lebih sesuai dengan kenyataan. Kelemahan teori ini adalah, meskipun kurva indifereen merupakan alat analisis yang kuat dalam teori, namun tidak begitu membantu dalam aplikasi di dunia nyata (Rohima, 2020).

Peran Pemerintah dalam Penyediaan Barang Publik

Peran eksekutif negara dalam pemerintahan adalah mengatur, mengelola, dan melayani masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta ketertiban dan keamanan nasional. Posisi ini mencakup sejumlah domain, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, sosial, dan ekonomi. Selain mengimplementasikan kebijakan, pemerintah juga berfungsi sebagai pengendali, pengatur, dan pelayan publik dalam kerangka kenegaraan. Ketika pasar tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata, keterlibatan pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah hadir dalam skenario ini untuk menjamin bahwa hak-hak dasar warga negara ditegakkan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik. Selain itu, posisi ini memerlukan upaya untuk memperkuat integrasi nasional, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dan membangun stabilitas ekonomi (Riofita, 2024).

Barang dan jasa publik disediakan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat umum, terlepas dari kemampuan keuangan individu. Proses pasar tidak dapat sepenuhnya menyediakan barang dan jasa publik ini karena barang dan jasa publik bersifat non-eksklusif (penggunaannya tidak dapat dikecualikan) dan non-rival (penggunaan oleh seseorang tidak membatasi ketersediaannya bagi orang lain). Barang dan jasa publik mencakup hal-hal seperti jalan, jembatan, penerangan jalan, pendidikan dasar, perawatan kesehatan, keamanan, kebersihan lingkungan, dan layanan administrasi publik, di antara hal-hal lain yang menjadi kepentingan publik. Sektor swasta sering kali tidak tertarik untuk menawarkan layanan ini karena hal itu tidak menguntungkan atau karena hal itu akan memakan biaya yang jauh lebih tinggi daripada keuntungan yang mungkin didapat. Untuk menjamin bahwa jasa dan layanan ini terus tersedia dan dapat diakses secara adil oleh semua

orang, pemerintah hadir untuk menyediakan layanan public tersebut (Muhdor & Riofita, 2024).

Barang dan jasa publik disediakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat, tetapi juga sebagai cara bagi negara untuk menegakkan hak-hak dasar rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pemasok, pengawas, dan pengatur kualitas serta pemerataan alokasi barang dan jasa publik. Menurut perspektif ekonomi publik, kegagalan pasar yaitu situasi di mana pasar tidak mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif atau adil dapat diatasi sebagian besar dengan penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah. Sebagai contoh, karena kendala keuangan yang tidak semua lapisan masyarakat mampu membayarnya, tidak semua anak akan memiliki akses terhadap kesehatan yang berkualitas atau pendidikan yang layak jika tidak ada tindakan dari pemerintah. Selain itu, penyediaan barang dan jasa publik mendorong stabilitas sosial dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang kurang berkembang secara ekonomi atau geografis. Dengan menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang adil dan merata, pemerintah dapat menutup kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara si kaya dan si miskin. Menurut Adam Smith dalam (Guritno, 2000 : 2), pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok sebagai berikut.

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dalam (Guritno, 2000 : 2) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, yaitu.

1. Fungsi Alokasi (Allocation Branch) yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (public needs). Sumber daya yang dimiliki pada dasarnya dapat digunakan untuk menciptakan produk publik dan privat. Barang-barang privat adalah barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh sistem pasar, khususnya melalui pertukaran pembeli-penjual. Namun, sektor swasta tidak dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Negara harus mendistribusikan barang publik, yang merupakan komoditas dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar. Contohnya adalah pertahanan, pembersihan udara, infrastruktur jalan, dan sebagainya, yang pengadaannya membutuhkan keterlibatan negara (pemerintah);
2. Fungsi Distribusi (Distribution Branch) yaitu fungsi yang didasarkan pada pertimbangan faktor sosio-ekonomi, seperti struktur pasar, mobilitas sosial, kemungkinan pendidikan, dan distribusi kekayaan dan pendapatan. Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal. Menerapkan sistem pajak progresif, yang membebaskan beban pajak yang lebih tinggi pada kelompok kaya dan beban pajak yang relatif lebih rendah pada kelompok miskin, disertai dengan subsidi untuk kelompok miskin, adalah salah satu pendekatannya. Pemerintah dapat secara tidak langsung mempengaruhi distribusi pendapatan

melalui langkah-langkah anggaran seperti memberikan kredit rumah murah bagi kelompok berpenghasilan rendah dan subsidi pupuk bagi petani.

3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Branch) yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan kestabilan dan kebijaksanaan- kebijaksanaan yang ada. Selain perannya dalam distribusi dan alokasi, pemerintah juga memainkan peran penting dalam menstabilkan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan sejumlah undang-undang. Pemerintah bertujuan untuk mempertahankan tingkat lowongan pekerjaan yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil, dan tingkat ekspansi ekonomi yang memadai (Azwar, 2016).
4. Fungsi Pembangunan. Fungsi pembangunan dilakukan ketika masyarakat dalam keadaan lemah, dan pembangunan akan dikendalikan ketika masyarakat dalam keadaan yang lebih baik (menuju tingkat yang lebih makmur). Negara-negara berkembang dan terbelakang menjalankan peran ini secara lebih aktif dibandingkan dengan negara-negara makmur.
5. Fungsi Pemberdayaan. Jika anggota masyarakat tidak memiliki keterampilan dan kemampuan untuk meninggalkan zona nyaman atau zona aman mereka, fungsi ini dijalankan. Misalnya, masyarakat tertindas, miskin, bodoh, dan sebagainya. Pemerintah harus mampu memberdayakan individu untuk menarik mereka keluar dari zona ini. Tujuan dari pemberdayaan adalah agar masyarakat mampu mewujudkan potensinya tanpa harus menjadi beban pemerintah. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau sumber daya manusia. Memberdayakan masyarakat akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah. sehingga memudahkan pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Dalam hal pemberdayaan, peran pemerintah adalah membimbing kemandirian dan pertumbuhan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang tidak selalu dibebankan oleh masyarakat (Sari, 2018).

Dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan bidang-bidang lainnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam pemenuhan pelayanan publik. Namun, tidak semua inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan berhasil dalam praktiknya, dan salah satu masalahnya adalah kurangnya aksesibilitas pelayanan publik, terutama di daerah terpencil atau kepulauan. Karena hambatan dalam memperoleh layanan publik, hingga 12 juta penduduk Indonesia terancam kehilangan hak-hak dasar mereka (Sari, 2018).

Tantangan dalam Pemerataan Akses Barang Publik

Pemerataan akses terhadap barang publik merupakan salah satu isu utama yang dihadapi pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Barang publik, yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif, menuntut intervensi pemerintah agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat tercapainya pemerataan tersebut. Berikut adalah uraian tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan akses barang publik.

1. Free Rider

Salah satu tantangan utama adalah fenomena free rider, di mana individu menikmati manfaat barang publik tanpa berkontribusi pada pembiayaannya. Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan mengumpulkan dana yang cukup untuk penyediaan barang publik secara optimal (Ostrom, 2010) (Bakara et al., 2024). Tindakan dari pihak yang ingin menggunakan berbagai fasilitas dan layanan publik yang ditawarkan oleh negara tetapi tidak ingin membayar untuk pendanaan dan pembangunan negara dikenal sebagai free rider dalam pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang free rider hanya ingin menggunakan berbagai fasilitas dan layanan publik tanpa harus membayar pajak. Padahal, pembayar pajak mendanai 80 persen pembangunan (Yulianto, 2022).

Dalam hal barang publik, free rider dapat berakibat buruk, seperti membebani konsumen yang membayar. Karena free rider, pengguna yang secara wajib membayar untuk barang publik harus menanggung beban yang lebih berat. Selain itu, kurangnya kontribusi dapat mengakibatkan kurangnya dana untuk pemeliharaan dan perbaikan barang publik, yang dapat menurunkan kualitasnya. Selain tidak adil bagi pelanggan yang membayar, free rider juga dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem. Barang publik dapat menjadi tidak berkelanjutan dan pada akhirnya gagal jika free rider terus berlanjut (Ramadhani, 2024).

2. Keterbatasan Data dan Preferensi Publik

Pemerintah sering kekurangan data yang akurat mengenai kebutuhan dan preferensi masyarakat yang beragam, sehingga sulit membuat kebijakan yang tepat sasaran dalam penyediaan barang publik. Bailey (2002) menambahkan bahwa karena preferensi masyarakat yang beragam dan informasi yang tersedia, pemerintah mengalami kesulitan untuk memutuskan berapa banyak barang publik yang harus disediakan (Bakara et al., 2024).

3. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan keuangan negara juga menjadi tantangan karena sumber daya yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah sering menghadapi keterbatasan dana dalam menyediakan barang publik secara optimal. Besarnya kebutuhan untuk membangun dan memelihara infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas umum lainnya membutuhkan anggaran yang besar. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan prioritas penyediaan barang publik sering kali terfokus pada wilayah tertentu, sehingga daerah terpencil atau kurang berkembang kurang memperoleh akses yang memadai (Mainingsih, 2024).

4. Kegagalan Tata Kelola dan Korupsi

Pengelolaan barang publik yang kurang transparan dan akuntabel dapat menyebabkan pemborosan, penyalahgunaan dana, dan pelayanan yang tidak tepat sasaran. Praktik korupsi dan birokrasi yang rumit menjadi penghambat utama dalam memastikan barang publik dapat dinikmati secara merata dan berkualitas. Investasi publik yang terlalu tinggi dan tidak efektif, komposisi pengeluaran yang tidak tepat,

dan birokrasi yang membengkak, semuanya terkait dengan korupsi. Biaya untuk operasi dan pemeliharaan, misalnya, mungkin dibayangi oleh tingginya tagihan gaji. Keputusan-keputusan yang diambil mungkin bias terhadap investasi modal besar dengan mengorbankan investasi padat karya, misalnya, untuk mengoptimalkan pengejaran keuntungan yang menguntungkan. Keputusan-keputusan mengenai komposisi utang publik juga dapat menjadi lebih berisiko dan pembayaran utang dapat menjadi lebih mahal bagi kas negara jika korupsi dan kurangnya transparansi terjadi (dan dapat memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi mitra-mitra komersial dari luar) (Kaufman, 2010).

5. Ketimpangan Geografis dan Sosial

Wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah tertinggal seringkali sulit dijangkau oleh layanan publik karena kondisi geografis yang berat dan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, kelompok masyarakat miskin dan rentan sosial ekonomi juga menghadapi hambatan akses akibat keterbatasan kemampuan finansial dan informasi. Hal ini memperlebar kesenjangan akses barang publik antar wilayah dan kelompok sosial. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesenjangan sosial semuanya terkena dampak negatif dari kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan tingginya jumlah orang yang memiliki upah rendah dan penurunan daya beli. Hal ini juga dapat menyebabkan konsumsi menurun, yang dapat menghambat permintaan barang dan jasa dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan dapat mengancam stabilitas masyarakat dengan meningkatkan ketegangan antara kelompok-kelompok sosial dan menimbulkan ketidakpuasan yang dapat mengakibatkan masalah atau konflik (Atisa, 2024).

6. Tantangan Tata Kelola dan Koordinasi

Desentralisasi dan otonomi daerah membawa tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan barang publik. Perbedaan prioritas, kapasitas, dan sumber daya antar daerah menyebabkan ketidakseimbangan dalam kualitas dan kuantitas barang publik yang tersedia (Andhika, 2017). Tantangan dalam mencapai pemerataan akses terhadap barang publik merupakan cerminan dari kesulitan masalah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sistemik dan memiliki banyak aspek. Untuk mengatasinya dan menjadikan pemerataan barang publik sebagai alat keadilan sosial yang sesungguhnya, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama, meningkatkan kapasitas kelembagaan, menerapkan reformasi tata kelola, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Strategi Pemerintah untuk Mengatasi Ketimpangan Akses

Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan akses barang publik melibatkan berbagai pendekatan yang dirancang untuk memastikan ketersediaan dan pemerataan manfaat barang publik bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Pemerintah harus melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara optimal. Pemerintah harus menjalankan fungsi alokasi untuk menentukan jenis dan jumlah barang publik yang dibutuhkan masyarakat, fungsi distribusi untuk menjamin pemerataan akses dan manfaat barang publik, serta fungsi stabilisasi untuk

menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Penyediaan barang publik yang efektif dapat dilakukan melalui penyediaan langsung, subsidi, atau regulasi yang tepat guna (Bakara et al., 2024). Salah satu tujuan utama pemerintah Indonesia adalah menciptakan infrastruktur yang merata, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup di seluruh negeri. Pemerintah menggunakan mekanisme hibah Barang Milik Negara (BMN) sebagai tambahan dari pembangunan anggaran langsung untuk mencapai tujuan ini. Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, hibah BMN merupakan salah satu cara bagi pemerintah daerah, institusi pendidikan, atau kelompok lain untuk menggunakan aset negara. Salah satu alat strategis APBN untuk mendorong pembangunan yang adil adalah mekanisme ini, yang sangat berguna di daerah-daerah yang pembangunan infrastrukturnya tertinggal.

Ekonomi yang inklusif sebagian besar dibangun di atas pondasi infrastruktur yang merata. Untuk meningkatkan mobilitas, mendistribusikan barang dan jasa, dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang diperlukan, harus ada akses ke jalan raya yang memadai, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan infrastruktur pendukung ekonomi lainnya. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, di mana daerah - daerah miskin sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas - fasilitas tersebut. Pemerintah pusat dapat mengalokasikan aset yang kurang dimanfaatkan ke daerah yang membutuhkan melalui proses hibah BMN. Sumber daya ini dapat terdiri dari tanah, bangunan, atau fasilitas lain yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi infrastruktur yang signifikan. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan daerah dengan biaya yang lebih murah dengan menggunakan BMN yang dihibahkan, sehingga dana APBN dapat dialokasikan secara lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Supriyanto, 2024).

Untuk memaksimalkan pendanaan dan efektivitas pembangunan infrastruktur, pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan sektor swasta melalui program kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP). Namun, efektivitas tata kelola pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik. Kemajuan teknologi di era digital juga membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Masyarakat dapat menerima layanan administrasi dari pemerintah dengan lebih cepat, transparan, dan bertanggung jawab berkat e-government. Perkembangan digital yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik antara lain layanan pajak online, pendaftaran sekolah online, dan telemedicine di bidang medis. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan terkini, sehingga memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih terarah dan peka terhadap kebutuhan Masyarakat (Muhdor & Riofita, 2024).

Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran khusus dan membuat program-program prioritas untuk daerah-daerah yang selama ini mengalami keterbatasan akses barang publik. Hal ini bertujuan mengurangi kesenjangan geografis dan sosial ekonomi antar wilayah. Pemerintah juga sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program penyediaan barang publik untuk menyesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat yang dinamis dan memastikan efektivitas serta keberlanjutan program. Peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik tidak hanya penting, tetapi juga sangat penting untuk mewujudkan negara yang makmur dan adil. Banyak kelompok masyarakat yang akan tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa adanya pemerintah yang terlibat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas tinggi, inklusif, dan tahan lama, sangat penting bagi setiap pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan kemampuan dan integritasnya.

Kesimpulan dan Saran

Pemerataan akses terhadap barang publik merupakan tanggung jawab fundamental pemerintah dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti fenomena free rider, keterbatasan anggaran, kesenjangan geografis, serta kelemahan tata kelola pemerintahan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan distribusi yang adil dan merata. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga memperparah kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Pemerintah perlu memahami bahwa ketersediaan barang publik yang inklusif dan setara merupakan indikator utama keberhasilan negara dalam menjalankan fungsi distribusi dan intervensi pasar yang adil. Untuk itu, strategi kebijakan yang lebih responsif, efisien, dan berbasis data harus terus dikembangkan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program, memperkuat pengawasan anggaran, serta memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi peluang penting untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam penyediaan barang publik. Dengan demikian, tantangan dalam pemerataan barang publik dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat peran negara sebagai pelayan rakyat dan penggerak keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Andhika, L. R. (2017). META-THEORY: KEBIJAKAN BARANG PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i1.697>
- Atisa, D. (2024). *Dampak Sosial Ekonomi Ketimpangan dalam Masyarakat: Tinjauan Mendalam*. Kumparan. <https://kumparan.com/diaz-atisa/dampak-sosial-ekonomi-ketimpangan-dalam-masyarakat-tinjauan-mendalam-21rb7HJIF37>
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Bakara, S., Wulandari, M., Lubis, E. H., Nasution, A. R., Maulana, J., Rahmi, S. N., & Simanungkalit, J. (2024). *Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik*. 4(1), 229–236.
- Elmizan, G. H. (2022). *MODUL EKONOMI PUBLIK*. 29.

- http://repo.uinbukittinggi.ac.id/716/2/MODUL_EKO_PUBLIK_GINA_2022.pdf
- Kaufman, D. (2010). *Dapatkah Korupsi Berdampak Buruk pada Keuangan Publik di Negara-negara Industri?* Brookings. [https://www-brookings-edu.translate.google.com/articles/can-corruption-adversely-affect-public-finances-in-industrialized-countries/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Ekonomi bayangan yang besar mengurangi,negara tersebut juga akan terga](https://www-brookings-edu.translate.google.com/articles/can-corruption-adversely-affect-public-finances-in-industrialized-countries/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Ekonomi%20bayangan%20yang%20besar%20mengurangi,negara%20tersebut%20juga%20akan%20terga)
- Mainingsih, S. (2024). Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat. *Kafalah*, 23–30.
- Muhdor, A., & Riofita, H. (2024). PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PUBLIK. *Inovasi Dan Kreativitas Dalam Ekonomi*, Vol 8 No 4(4), 1. <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/353%0Ahttps://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/download/353/96>
- Ramadhani, O. B. (2024). *Fenomena Free Riding: Mengapa Barang Publik Terancam dan Bagaimana Solusinya?* Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/oktabagasramadhani2507/6639f1e81470935dc4393532/fenomena-free-riding-mengapa-barang-publik-terancam-dan-bagaimana-solusinya?page=all#section1>
- Rawung, S. S., Rumagit, M. C. ., & Supriyanto. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Publik* (Cetakan 1). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Riofita, H. (2024). Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151. <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/353%0Ahttps://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/download/353/96>
- Rohima, S. (2020). *Ekonomi Publik*. UPT. Peenebit dan Percetakan. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sari, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 1–12. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1678011&val=18206&title=Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1678011&val=18206&title=Peran%20Pemerintah%20dalam%20Penyediaan%20Akses%20Pelayanan%20Publik)
- Supriyanto, B. E. (2024). APBN Dorong Pemerataan Infrastruktur Melalui Hibah BMN. *DJJPB Kemenkeu*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3771-apbn-dorong-pemerataan-infrastruktur-melalui-hibah-bmn.html>
- Yulianto, H. (2022). *Mengenal “Free Rider” Menuju Indonesia Emas 2045*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-free-rider-menuju-indonesia-emas-2045/>